
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BERBASIS BUKTI MELALUI PELATIHAN METODE PRA DI WILAYAH BINAAN LEMBAGA JALIN NUSA

**[Promoting Evidence Based Village Government Action Plan through Training of PRA
Method at Working Area of Jalin Nusa Institute]**

Lalu Muh. Kabul

Universitas Teknologi Mataram

lpp.lombok@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu mengembangkan rencana kerja pemerintah desa berbasis bukti melalui pelatihan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) di wilayah kerja Lembaga Jalin Nusa. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi survey, penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pelatihan PRA berlangsung selama 3 hari dengan menggunakan pendekatan dan metode pendidikan orang dewasa. Menurut sebagian besar peserta pelatihan (88,33 persen) pelaksanaan pelatihan PRA berlangsung dengan baik. Sebelum pelatihan, menurut sebagian besar peserta pelatihan (91,67 persen) bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai metode PRA. Sementara, setelah pelatihan menurut sebagian besar peserta pelatihan (93,33 persen) bahwa mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik mengenai metode PRA..

Kata kunci: Berbasis bukti; Rencana kerja; PRA

ABSTRACT

The aim of implementing services is to promote evidence based village government action plan through participatory rural appraisal (PRA) training at working area of Jalin Nusa Institute. The method used in implementing services consist of survey, promote training module, training implementation, monitoring and evaluation. The PRA training has been carried out for 3 days by using emancipatory adult education method and approach. According to the most of training participant (83.33 percent) training PRA has been well conducted. Before training, according to most of training participant (91.67 percent) that they have no knowledge and skill about PRA method. Meanwhile after training, according to most of training participant (93.33 percent) that they have gained a good knowledge and skill about PRA method.

Keywords: Evidence based; Action plan; PRA

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa memiliki rencana pembangunan tahunan yang oleh desa disusun setiap tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam pada itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang berlangsung sekali setiap tahun dihadiri oleh para tokoh masyarakat desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan

kelembagaan desa, warga masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lain-lain. Lebih jauh, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihasilkan melalui Musrenbangdes tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

Berbagai pihak yang hadir dalam Musrenbangdes umumnya memiliki pemahaman dan opini yang berbeda terhadap suatu masalah, sehingga yang diperoleh bukanlah masalah inti (*core problem*), melainkan gejala masalah (*symptom*). Oleh karena itu, persoalan pembangunan di desa jarang bisa dipecahkan secara tuntas karena persoalan yang dipecahkan hanyalah sebatas gejala masalah, bukan masalah inti. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Desa perlu dikembangkan dengan berbasis pada bukti (*evidence*) dimana dengan keberadaan bukti ini, berbagai pihak yang hadir dalam Musrenbangdes dalam rangka penyusunan Renja dimaksud tidak lagi melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, tetapi dari sudut pandang yang sama sehingga diperoleh masalah inti. Untuk memperoleh bukti dalam pengembangan Renja Pemerintah Desa sebagai sebuah formulasi kebijakan desa, maka menurut Davies (2004) diperlukan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Dengan perkataan lain, kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) merupakan lawan dari kebijakan berbasis opini (*opinion based policy*).

Istilah kebijakan berbasis bukti dipopulerkan pertama kali pada tahun 1997 oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair (Bachtiar, 2011). Menurut Watts (2013) bahwa bukti mencakup pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, hasil-hasil dari konsultasi, hitungan biaya opsi-opsi kebijakan, dan keluaran dari permodelan ekonomi dan statistik. Disisi lain, Court et al (2016) menyatakan bahwa bukti dapat diperoleh melalui penelitian secara luas sebagai suatu hal yang mencakup segala upaya sistematis untuk meningkatkan persediaan pengetahuan termasuk penyelidikan dan evaluasi kritis, penyusunan teori, pengumpulan, analisis, serta riset berorientasi aksi.

“Participatory Rural Appraisal (PRA)” merupakan riset participatoris berorientasi aksi yang dikenal sejak tahun 1980-an dan 1990-an (Chambers, 2014; Cernea, 2011). Dalam pada itu, PRA sebagai sebuah pendekatan dan metode berbeda dengan Rapid Rural Appraisal (RRA) yang telah dikenal sebelumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Lebih jauh disebutkan oleh Chambers (2014) bahwa penemu utama RRA adalah Universitas; sedangkan PRA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Disisi lain, sumberdaya utama dalam RRA adalah pengetahuan warga lokal; sedangkan PRA adalah kemampuan warga lokal. Sasaran RRA yakni pembelajaran oleh pihak luar; sedangkan PRA merupakan pembelajaran masyarakat lokal. Hasil RRA berupa rencana, proyek, publikasi; sedangkan PRA berupa keberlanjutan kegiatan lokal dan kelembagaan (Carruthers & Chambers, 2015).

Bila dalam RRA, masyarakat lokal memperoleh pembelajaran dari pihak luar; sedangkan dalam PRA terjadi pembelajaran terbalik yakni pihak luarlah yang belajar dari masyarakat lokal. Dalam konteks PRA, pembelajaran dilakukan secara cepat dan progresif melalui eksplorasi, fleksibel, iterative (Conway, 2017). Untuk mencegah terjadinya bias dilakukan proses cross-checking, rileks tidak terburu-buru, mendengarkan bukan menggurui, fokus pada satu topik bukan pada beberapa topik (Chambers, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat lokal perlu diberikan pelatihan metode PRA dengan tujuan agar masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggali bukti sebagai basis dalam Musrenbangdes. Beberapa jenis metode PRA yaitu pemetaan secara partisipatif, transek, time lines, trend analysis, analisis penghidupan, matrisk ranking dan skor, kalender musim, diagram Venn, dan lain-lain (NCAER, 2017). Kegiatan pelatihan metode PRA ini dilaksanakan di wilayah binaan Lembaga Jalin Nusa.

METODE PENERAPAN

Metode pelaksanaan kegiatan training metode PRA di wilayah binaan Jalin Nusa meliputi beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, survey dimana kegiatan survey dilakukan di wilayah binaan Jalin Nusa yang ditetapkan sebagai lokasi pelatihan yaitu Kecamatan Sembalun. Dalam pada itu, Kecamatan Sembalun meliputi 6 (enam) desa dan dari setiap desa diambil sebanyak peserta 10 orang peserta pelatihan, sehingga total peserta pelatihan sebanyak 60 orang. Tahap kedua, penyusunan modul pelatihan dimana modul pelatihan ini memuat materi pelatihan dan metode pelatihan. Materi pelatihan

meliputi pemetaan partisipatif, transek, time lines, trend analysis, analisis penghidupan, diagram Venn, ranking kesejahteraan, analisis perbandingan, matriks ranking dan skoring, diagram/kalender musim. Dalam proses pelatihan digunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*emancipatory adult education*) dengan metode pelatihan meliputi curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, ceramah, praktek kerja kelompok, presentasi kelompok.

Tahap ketiga, pelaksanaan pelatihan dimana dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan dilakukan pembagian peran antara oleh Lembaga Jalin Nusa dan Universitas Teknologi Mataram (UTM). Lembaga Jalin Nusa berperan sebagai panitia pelaksana pelatihan; sementara UTM berperan sebagai fasilitator pelatihan. Tahap keempat, monitoring dan evaluasi dimana dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan interaksi aktif peserta pelatihan dan fasilitator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Binaan Jalin Nusa

Kecamatan Sembalun merupakan wilayah binaan Lembaga Jalin Nusa di Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Sembalun dengan luas wilayah 257,08 Km² dan berada pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut (dpl) memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Sembelia

Sebelah Timur : Kecamatan Pringgabaya

Sebelah Selatan : Kecamatan Aikmel dan Pringgasea

Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Jarak Kecamatan Sembalun dari ibu kota Kabupaten Lombok Timur, Selong yakni sekitar 49 Km dengan kondisi jalan aspal hotmix. Berdasarkan data BPS Lombok Timur (2014) bahwa penduduk Kecamatan Sembalun mencapai 25.190 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,10 persen per tahun. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Sembalun yakni sebesar 102,30 dengan kepadatan penduduk sebesar 116 jiwa per Km². Kecamatan Sembalun terdiri dari 6 (enam) desa, yaitu Sembalun, Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun Timba Gading, Bilok Petung, dan Sajang. Lebih dari separuh lahan di Kecamatan Sembalun yakni seluas 14.716 Ha (57,24 persen) merupakan hutan negara dan lahan yang berupa sawah yang ditanami padi satu kali dalam setahun seluas 1.105 Ha (4,30 persen).

Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelaksanaan pelatihan PRA ini digunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*emancipatory adult education*) dimana pendekatan ini menurut Chambers (2014) berakar pada karya Paulo Freire (1968) dalam karyanya "Pedagogy of the Oppressed" yang kemudian berkembang pada tahun 1970-an menjadi gerakan pendidikan orang dewasa. Dalam konteks pendidikan orang dewasa tidak dikenal istilah guru atau pelatih, melainkan fasilitator. Dalam pada itu, keberadaan fasilitator tidaklah menggurui, melainkan membuat lebih mudah terjadinya proses saling belajar antara peserta pelatihan yang satu dengan lainnya melalui interaksi aktif fasilitator dengan peserta pelatihan secara rileks dan menyenangkan.

Pelatihan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimana materi pelatihan hari pertama meliputi pemetaan partisipatif, transek, time lines, trend analysis. Materi pelatihan hari kedua meliputi analisis penghidupan, diagram Venn, ranking kesejahteraan. Materi pelatihan hari ketiga meliputi analisis perbandingan, matriks ranking dan skoring, diagram/kalender musim. Dalam pelatihan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut, metode pelatihan yang diterapkan meliputi curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, ceramah, praktek kerja kelompok, presentasi kelompok. Selama 3 (tiga) hari berlangsungnya pelatihan, pengelolaan kelas dilakukan secara partisipatif dan dipimpin oleh Ketua Kelas yang dipilih secara demokratis oleh para peserta pelatihan.



Gambar 1. Pertemuan Penyusunan Modul Pelatihan



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelatihan dilakukan secara partisipatif yang melibatkan fasilitator dan peserta pelatihan. Kegiatan monitoring dilakukan setiap hari dimana pada akhir sesi pelatihan dilakukan refleksi diri dimana hasil refleksi ini digunakan sebagai perbaikan untuk proses pelatihan hari berikutnya. Disisi lain, evaluasi partisipatif dilakukan pada hari ketiga pelatihan dengan fokus pada aspek harapan peserta, pelaksanaan pelatihan, dan penguasaan materi pelatihan. Berdasarkan aspek harapan peserta diperoleh bahwa sebagian besar peserta pelatihan (90 persen) menyatakan materi pelatihan telah sesuai dengan harapan mereka dan lainnya (10 persen) menyatakan sangat sesuai serta tidak ada peserta yang menyatakan kurang sesuai maupun tidak sesuai.

Berdasarkan aspek pelaksanaan pelatihan diperoleh bahwa sebagian besar peserta pelatihan (88,33 persen) menyatakan pelaksanaan pelatihan berlangsung dengan baik dan lainnya (11,67 persen) menyatakan pelatihan berlangsung dengan sangat baik. Tidak ada peserta pelatihan yang menyatakan pelaksanaan pelatihan berlangsung dengan kurang baik maupun tidak baik. Disisi lain, berdasarkan aspek penguasaan materi pelatihan dimana sebelum pelatihan sebagian besar peserta pelatihan (91,67 persen) menyatakan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai metode PRA dan lainnya (18,23 persen) menyatakan pengetahuan dan keterampilannya mengenai metode PRA tergolong. Sementara, setelah pelatihan dimana sebagian besar peserta pelatihan (93,33 persen) menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya mengenai metode PRA tergolong baik dan lainnya (6,67 persen) menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya mengenai metode PRA tergolong sangat baik.



Gambar 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

PENUTUP

Simpulan

Dalam pelaksanaan pelatihan PRA ini digunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*emancipatory adult education*) dan pelatihan berlangsung selama 3 (tiga) hari. Materi pelatihan hari pertama meliputi pemetaan partisipatif, transek, time lines, trend analysis. Materi pelatihan hari kedua meliputi analisis penghidupan, diagram Venn, ranking kesejahteraan. Materi pelatihan hari ketiga meliputi analisis perbandingan, matrisk ranking dan skoring, diagram/kalender musim. Dalam pelatihan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut, metode pelatihan yang diterapkan meliputi curah pendapat, diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, ceramah, praktek kerja kelompok, presentasi kelompok. Dari hasil evaluasi pelatihan diperoleh bahwa sebagian besar peserta pelatihan (90 persen) menyatakan materi pelatihan telah sesuai dengan harapan mereka kemudian sebagian besar peserta pelatihan (88,33 persen) menyatakan pelaksanaan pelatihan berlangsung dengan baik. Sebelum pelatihan sebagian besar peserta pelatihan (91,67 persen) menyatakan tidak menguasai materi pelatihan dan setelah pelatihan dimana sebagian besar peserta pelatihan (93,33 persen) menyatakan telah menguasai materi pelatihan dengan baik.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan PRA ini, maka untuk penerapan PRA di tingkat desa sebaiknya dibentuk “Lembaga Perencanaan Pembangunan Desa (LAPEDes)” yang menangani kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) termasuk penerapan metode PRA dalam konteks Musrenbangdes. Pembentukan LAPEDes ini sebaiknya ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Selain menangani Musrenbangdes dan penerapan metode PRA, LAPEDes juga diharapkan berperan membantu pemerintah desa dalam melakukan koordinasi pembangunan desa dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Palmira P., (2021). *Menghasilkan Bukti Sebagai Informasi Bagi Proses Penyusunan Kebijakan di Indonesia: Tantangan Pada Sisi Penawaran*. SMERU NewsLetter 32, 3-11.
- BPS Lombok Timur, (2014). *Lombok Timur Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Selong.
- Carruthers, I. & Chambers R., (2015). *Rapid Appraisal for Rural Development*. Agricultural Administration 8(6), 407-422.
- Cernea, M., (2013). *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*. Second edition, Oxford University Press for the World Bank, New York.
- Chambers, R., (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience*. World Development 22(9), 1253-1268.
- Chambers, R., (2011). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*. IDS Discussion Paper 311, Institute of Development Studies.

- Conway, G., (2017). *Agroecosystem Analysis*. Agricultural Administration 20(9), 31-35.
- Court, J. et al, (2016). *Policy Engagement: How Civil Society Can be More Effective*. Overseas Development Institute, London.
- Davies, Philip, (2004). *Is Evidence Based Government Possible?*. Jerry Lee Lecture 2004 at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium.
- NCAER, (2017). *Comparative Study of Sample Survey and Participatory Rural Appraisal Methodologies*. National Council for Applied Economic Research, New Delhi.
- Watts, R., (2013). *Tampering with Evidence: A Critical Appraisal of Evidence Based Policy Making*. Policy Press, Bristol.